



## Moderasi Transparansi Media Sosial pada Pengaruh Koneksi Politik terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Frandy E. F. Karundeng<sup>1</sup>, Pricilia J. Pesak<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Department of Accounting, Universitas Negeri Manado, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 25 April 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 26 Mei 2023

#### Keywords:

Political Connection

Fraudulent Financial Statements

Social Media

Corruption

Mining Company

### ABSTRACT

Banyak *top management* perusahaan di Indonesia yang terkoneksi secara politik. Sayangnya, banyak juga kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, melihat perkembangan penyebaran informasi melalui media sosial yang begitu cepat dan mudah, maka transparansi media sosial digunakan sebagai variabel yang moderasi hubungan antara koneksi politik dan kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021, dan menggunakan alat uji statistik smartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh pada indikasi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan model Benih M-Score, perusahaan tidak tergolong sebagai manipulator laporan keuangan. Selain itu, para elit politik dalam perusahaan juga akan cenderung untuk menjaga legitimasi dari masyarakat, sebab jika informasi kecurangan terungkap di publik, maka akan merusak citra publik dan bisa mengancam karir politiknya. Begitu juga dengan transparansi media sosial tidak mampu memoderasi karena masyarakat menganggap informasi yang diungkapkan perusahaan tidak merefleksikan kondisi yang sebenarnya. Akhirnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber masukan yang valid dalam menentukan indikasi kecurangan laporan keuangan, serta bisa menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan komposisi dewan komisaris dan direksi perusahaan.

*There are many top management of companies in Indonesia who are politically connected. Unfortunately, there are also many corruption cases in Indonesia that involving companies with political connections. Therefore, this study was conducted to examine and analyze the effect of political connections on indications of fraudulent financial statements. Furthermore, looking at the fast and easy dissemination of information through social media, the social media transparency is used as a variable that moderates the relationship between political connections and fraudulent financial statements. This research was conducted on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2021, and used the smartPLS statistical test tool. The results of the study showed that political connections have no effect on indications of fraudulent financial statements. Based on the Benih M-Score model, the sample companies is not classified as a financial statements manipulator. In addition, the political elites within the company will also tend to maintain legitimacy from the public, because if fraudulent information is revealed, it will harm the public image and could threaten their political career. Likewise, the transparency of social media is not able to moderate because the public considers that the information disclosed by the companies do not reflect the real conditions. Finally, this research is expected to be a valid source of input in determining indications of fraudulent financial statements, and can be taken into consideration by companies in determining the composition of the company's board of commissioners and directors.*

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



#### Corresponding Author:

Frandy E. F. Karundeng

Department of Accounting, Universitas Negeri Manado,

Jl. Kampus Unima, Tondano

Email: [frandykarundeng@unima.ac.id](mailto:frandykarundeng@unima.ac.id)

## PENDAHULUAN

Biasanya, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki banyak perusahaan yang pimpinannya terkoneksi secara politik (Faccio, 2010). Sayangnya, berdasarkan data sampel penelitian dari 47 negara yang dilakukan oleh Faccio pada tahun 2010, Indonesia merupakan negara dengan proporsi terbesar jumlah perusahaan yang terkoneksi politik. Kondisi ini semakin diperkuat dengan hasil yang dikeluarkan oleh *Transparency International Index* terkait dengan *Corruption Perception Index* di Indonesia, yaitu pada tahun 2022 peringkat Indonesia merosot dari peringkat 96 menjadi 110 dari total 180 negara. Situasi ini semakin nyata dengan begitu banyaknya kasus kecurangan atas laporan keuangan yang melibatkan perusahaan yang memiliki koneksi politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Beberapa di antaranya adalah kasus kecurangan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan memanipulasi pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018 (binus.ac.id). Ada juga kasus PT Adaro Energy Tbk yang terindikasi melakukan kecurangan *transfer pricing* (unair.ac.id). Serta masih banyak lagi kasus-kasus kecurangan yang terjadi atas laporan keuangan, seperti PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasrya (liputan6.com). Dengan demikian, di Indonesia masih menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara kepentingan politik dengan dunia bisnis.

Koneksi politik perusahaan memiliki peran yang signifikan terkait dengan strategi perusahaan, yaitu memberikan kekuatan dan rasa aman di tengah-tengah persaingan antar perusahaan (Habib, dkk., 2018). Bahkan, Muttakin, dkk (2015) menyatakan bahwa dengan bantuan para politisi, perusahaan menjadi dipermudah dalam untuk mengakses sumber daya yang strategis, bahkan dengan bantuan mereka, perusahaan bisa menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah, bahkan menghindari tekanan atas berbagai tuntutan pemerintah. Upaya yang dilakukan para politisi bagi perusahaan di antaranya adalah dengan melakukan lobi-lobi kepada pemerintah untuk kemudahan dalam pencapaian kepentingan perusahaan (Wu, dkk., 2012). Menurut Ahsan and Abdul (2018), kegiatan yang dilakukan oleh para politisi perusahaan meningkatkan *agency cost*, seperti proses lobi, mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan politis atau sosio-economic, dan *back-up* proses kampanye atau *fund-raising* selama pemilihan. Leuz and Gee, (2006) juga mengatakan bahwa jika perusahaan melakukan manipulasi data keuangan dan akhirnya menghasilkan *low-quality financial reporting*, maka politisi yang terkait dengan perusahaan tersebut akan berupaya untuk melindungi atau menutupi kecurangan yang terjadi.

Namun demikian, dengan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi melalui media sosial akan mengakselerasi perusahaan untuk lebih transparan atas keputusan dan aktivitas-aktivitas rutin yang dilakukan. Media sosial menjadi alat untuk lebih terbuka kepada publik, serta sebaliknya bisa menjadi *watch dog* bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan pemerintah untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan perusahaan (Mäkinen dan Kuiru, 2018). Astutik, Harymawan, dan Nasih (2018) melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa, semakin tinggi pengungkapan media sosial, maka semakin rendah indikasi kecurangan atau semakin rendah asimetri informasi. Bahkan Miller (2006) juga menyatakan bahwa media mempunyai peranan yang penting dalam mendeteksi terjadinya kecurangan akuntansi.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh koneksi politik perusahaan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan media sosial sebagai variabel yang memperlemah hubungan antara koneksi politik perusahaan dengan indikasi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2021. Perusahaan pertambangan merupakan suatu sektor industri yang memiliki koneksi politik yang kuat, yaitu banyaknya politisi yang menduduki posisi *top management* perusahaan. Lebih dari itu, Mining Advocacy Network (2018) menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan, khususnya sektor batu bara, telah menjadi sumber utama pendanaan bagi aktivitas politik di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam mengembangkan literatur terkait dengan penyebab kecurangan atas laporan keuangan berdasarkan pengaruh dari koneksi politik dan media sosial. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa menjadi input yang valid bagi pemerintah dalam mengawasi dan membuat peraturan terkait laporan keuangan. Bahkan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pemenuhan komposisi dewan komisaris dan direksi yang melibatkan para politisi.

## KAJIAN TEORI

### *Signalling Theory*

Signalling Theory merupakan teori terkait dengan informasi yang dibagikan oleh manajemen perusahaan (*sender*) kepada para *shareholders (receiver)* (Brigham dan Houston, 2011). Informasi yang diterima oleh *shareholders* bisa berbeda (asimetri informasi) satu dengan yang lainnya karena ketidaksamaan jumlah, kesesuaian, dan kualitas informasi yang diterima (Taj, 2016). Informasi yang akurat perlu untuk dimiliki agar bisa membuat keputusan bisnis yang tepat. Maka dari itu, tujuan dari adanya *signaling theory* adalah untuk mengurangi atau mengeliminasi adanya asimetri informasi (Astutuik, Harymawan, dan Nasih., 2018).

### *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi merupakan teori yang menjelaskan tentang adanya kesamaan persepsi atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan ekspektasi sosial masyarakat (Deegan, 2002). Jika perusahaan tidak menghiraukan ekspektasi sosial masyarakat, maka perusahaan kehilangan legitimasi masyarakat (Black and Quach, 2009). Teori ini dilihat sebagai suatu perspektif sistem orientasi, yaitu suatu perusahaan bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunitas sosial di mana perusahaan itu beroperasi (Suchman, 1995).

### *Agency Theory*

Teori agensi adalah suatu hubungan perjanjian antara prinsipal dan agen, dalam hal ini principal merupakan para *shareholder* dan agen adalah pihak manajemen perusahaan. Prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk melakukan pelayanan atau menjalankan operasional perusahaan atas nama prinsipal itu sendiri (Jensen dan Meckling, 1976). Namun demikian, agen bisa melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dirinya, namun merugikan kepentingan perusahaan, misalnya dengan memanipulasi laporan keuangan. Karena hal ini, maka muncul masalah keagenan, yaitu perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal sebagai pemilik perusahaan (Eisenhardt, 1989).

### Koneksi Politik

Koneksi politik perusahaan merupakan suatu struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari orang yang memiliki ikatan secara politik, serta terkait dengan jabatan pemerintahan (Muttakin, dkk., 2015). Selanjutnya Ahsan dan Abdul (2018) memberi contoh koneksi politik perusahaan, yaitu salah satu pimpinan perusahaan seperti CEO, wakil presiden, anggota dewan direksi dan komisaris, serta sekretaris yang juga menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota dewan, menteri, kepala badan pemerintahan, atau terkait erat dengan politisi dan partai politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung menghindari transparansi dan pengawasan dan mendapatkan akses pendanaan yang lebih lancar karena adanya bantuan dari petinggi perusahaan yang juga pejabat kenegaraan (Utaminingsi, 2019). Selanjutnya, Utaminingsi (2019) juga menyatakan bahwa koneksi politik perusahaan membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan transaksi hubungan kusus tersebut untuk penyaluran dana yang ada.

### Media Sosial

Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaan, seperti informasi non keuangan (Astutik, Harymawan, dan Nasih, 2018). Karakiza (2015) juga menjelaskan bahwa platform media sosial atau Web 2.0 yang berbasis internet mendukung pertukaran informasi, baik dalam bentuk teks, gambar, dan video yang bisa menciptakan transparansi, rasa percaya masyarakat, dan memperkuat reputasi perusahaan.

### Kecurangan Laporan Keuangan

Statement of Auditing Standads (SAS) No. 99 menjelaskan bahwa *fraud* atau kecurangan merupakan tindakan yang disengaja yang menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan (AICPA,

2022). Wells (2005) mendefinisikan *fraud* sebagai semua bentuk kejahatan untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu sebagai modus operandi utamanya. *Fraud* disebabkan oleh tiga hal yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu *financial pressure*, *rationalization*, dan *opportunity* (Singleton, 2010). Skema *fraud* digambarkan dalam *fraud tree* yang terdiri dari tiga kategori utama yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan (ACFE, 2016).

Hipotesis 1: Pengaruh Koneksi Politik terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut para auditor, dengan adanya koneksi politik dalam perusahaan bisa memberikan sinyal yang positif bagi para pengguna laporan keuangan, karena mereka bisa meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dilaporkan (Ahsan dan Abdul, 2018). Bahkan bisa memitigasi asimetri informasi dari laporan keuangan yang diungkapkan dan meminimalisasi isu diskriminasi sosial. Namun demikian, banyak hasil penelitian yang justru menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik lebih cenderung melakukan *earning-management* dan menghasilkan kualitas laporan akuntansi yang rendah dari pada perusahaan yang tidak terkoneksi secara politik (Preuss dan Königgruber, 2020). Faccio (2010) juga menambahkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki tingkat utang yang tinggi dan pembayaran pajak yang rendah. Lebih dari itu, Ahsan dan Abdul (2018) juga menyatakan bahwa koneksi politik menyebabkan meningkatkan *agency cost*. Sabrina, dkk. (2020) juga mengatakan bahwa koneksi politik perusahaan menjadi celah untuk dapat lebih leluasa beraktifitas dan bertindak oportunistik, yang salah satu bentuk tindakannya adalah memanipulasi laporan keuangan.

H1: Koneksi politik berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan

Hipotesis 2: Pengaruh Media Sosial terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Media sosial menjadi platform bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat atau para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi melalui media sosial mendukung perusahaan untuk mencapai *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu adanya transparansi pengelolaan perusahaan. Bahkan, melalui media sosial para *shareholders* dan *stakeholders* bisa menjadi *watchdog* yang mengawasi segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga bisa memitigasi kemungkinan dilakukannya tindakan kecurangan atas laporan keuangan (Astutik, Harymawan, dan Nasih, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gajewski dan Li (2015) juga mendukung media sosial sebagai sarana untuk mencegah terjadinya *fraud* atas laporan keuangan.

H2: Media sosial berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan

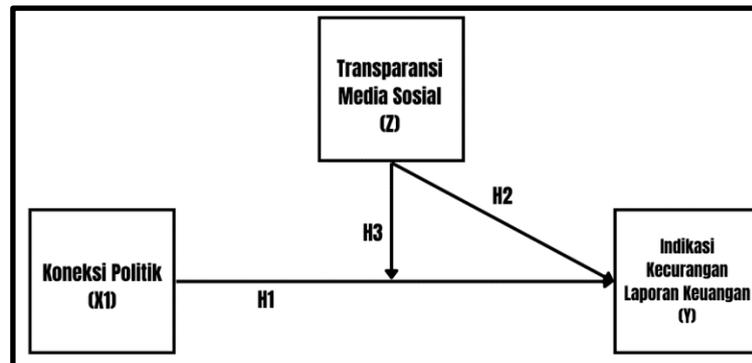
Hipotesis 3: Pengaruh Media Sosial sebagai Variabel Moderasi terhadap hubungan antara Koneksi Politik dan Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan dengan

Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu dan lebih mudah untuk mengalami *financial distress*, sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan kecurangan laporan keuangan (Wu, dkk., 2012). Contohnya adalah melakukan *window dressing* agar laporan keuangan terlihat bagus di publik atau investor, menekan biaya yang lain karena besarnya biaya pendanaan politik, dan memanipulasi jumlah pajak terutang karena adanya kedekatan hubungan dengan pemerintah (Sumual dan Karundeng, 2021). Akan tetapi, dengan adanya media sosial yang merupakan sarana transparansi perusahaan bisa membantu para *shareholders* dan *stakeholders* untuk mengawasi aktivitas perusahaan yang pada akhirnya bisa memperkuat legitimasi dan meningkatkan kepercayaan (Astutik, Harymawan, dan Nasih, 2018).

H3: Media Sosial memoderasi hubungan antara Koneksi Politik dan Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Rerangka Konseptual Penelitian

Model penelitian terkait pengaruh koneksi politik terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan dengan transparansi media sosial sebagai variabel moderasi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rerangka Konseptual Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan data bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang diunduh dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI) dan laman resmi tiap-tiap perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. *Purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel yang paling representatif. Data terkait koneksi politik tiap perusahaan dikumpulkan dengan mengkategorikan dan mencocokkan secara manual dari laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan hipotesis diuji secara statistik dengan menggunakan alat uji statistik smartPLS versi 3.2.9.

Variabel dependen, yaitu indikasi Kecurangan Laporan Keuangan (KLK) diukur menggunakan model Benish M-Score. Rasio keuangan yang digunakan dalam model Benish M-Score adalah Days Sales in Receivables Index (DSRI), Gross Margin Index (GMI), Asset Quality Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), dan Depreciation Index (DEPI). Perusahaan akan dikategorikan melakukan manipulasi keuangan jika nilai dari M-Score lebih dari -2.2, dan begitu sebaliknya. Berikut persamaan model Benish M-Score 5 variabel (Benish, dkk., 2012).

$$M = -6.065 + 0.823 \text{ DSRI} + 0.906 \text{ GMI} + 0.593 \text{ AQI} + 0.717 \text{ SGI} + 0.107 \text{ DEPI}$$

Variabel independen berupa Koneksi Politik (KP) diukur dengan menggunakan dewan komisaris dan dewan direksi yang terkoneksi secara politik. Kriteria terkoneksi secara politik adalah memiliki dan pernah menjabat posisi strategis di pemerintahan, seperti presiden, wakil presiden, menteri, duta besar, anggota legislatif, kepala badan pemerintahan, kepala daerah, tergabung dalam partai politik, dll (Ahsan dan Abdul, 2018). Rumus proporsi koneksi politik adalah sebagai berikut (Sumual dan Karundeng, 2021).

$$\text{Koneksi Politik} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris} + \text{Jumlah Dewan Direksi yang terkoneksi politik}}{\text{Total Dewan Komisaris} + \text{Dewan Direksi}}$$

Variabel independen yang sekaligus sebagai variabel moderasi, Media Sosial (MS) diukur dengan menggunakan Internet Corporate Disclosure Index (ICDI) yang memiliki 32 kriteria berdasarkan hasil pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Garay, dkk. (2013). Perusahaan yang mengungkapkan kriteria tersebut pada laman internet resmi perusahaan akan diberi nilai 1, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan.

## HASIL PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021 yang berjumlah 47 perusahaan dengan 94 data observasi. Dalam penelitian ini, jumlah data observasi adalah sebanyak 59 data.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data Observasi
1	Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021	47	141
2	Jumlah perusahaan pertambangan yang tidak terkoneksi secara politik.	(15)	(77)
3	Jumlah perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama periode observasi.	(1)	(1)
4	Jumlah perusahaan yang data keuangan tidak tersedia selama periode observasi	(1)	(2)
5	Jumlah perusahaan yang tidak bisa diakses laman resminya di internet	(1)	(2)
<b>Total</b>		29	59

Sumber: Data Diolah smartPLS, 2023.

### Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan data satastistik deskriptif yang terlihat pada Tabel 2, maka dapat diketahui bahwa rata-rata perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021 memiliki pimpinan perusahaan (*top management*) yang terkoneksi politik dengan jumlah yang cukup besar yaitu lebih dari satu per empat total dewan komisaris dan dewan direksi atau sebesar 26.56%. Nilai yang signifikan juga terlihat pada pengungkapan informasi perusahaan lewat media sosial, yaitu mencapai 78.66%. Hal ini berarti bahwa sudah banyak perusahaan pertambangan yang berani untuk melakukan transparansi atas kegiatan yang dilakukan. Tingkat kecurangan laporan keuangan yang diukur menggunakan model Bensih M-Score menunjukkan nilai rata-rata sebesar -2.5762. Nilai ini mengungkapkan bahwa perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian termasuk dalam kategori perusahaan yang tidak melakukan kecurangan laporan keuangan karena nilainya lebih kecil dari -2.22.

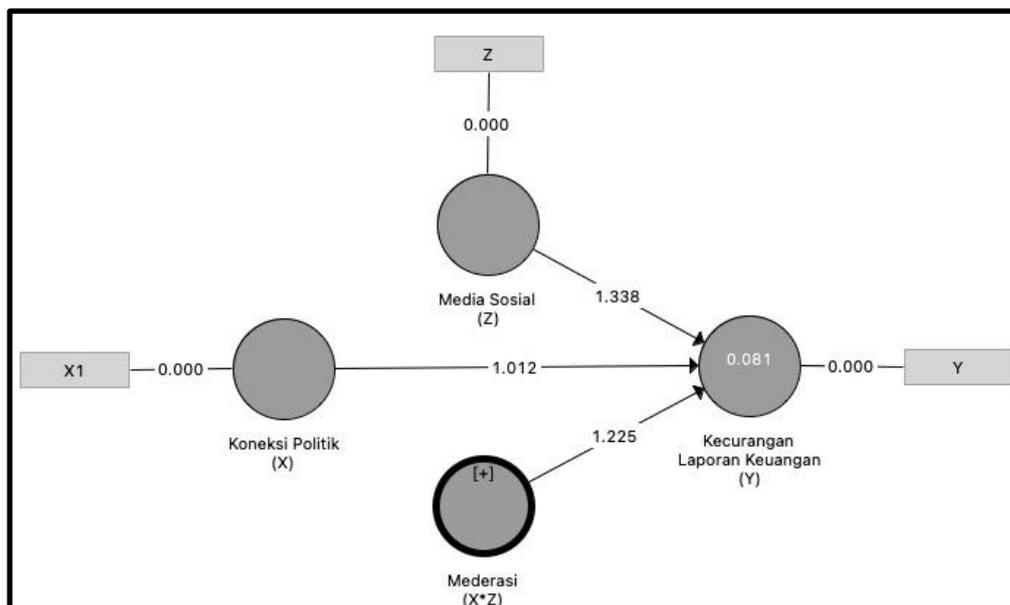
Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi
<b>Koneksi Politik (X)</b>	59	0.2656	0.0833	0.7778	0.1644
<b>Media Sosial (Z)</b>	59	0.7866	0.4063	0.9688	0.1971
<b>Kecurangan Laporan Keuangan (Y)</b>	59	-2.5762	-10.2166	1.5911	1.5911

Sumber: Data Diolah smartPLS, 2023.

### Skema Model Partial Least Square (PLS)

Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi smartPLS 3.2.9. Skema model PLS dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema Model Progam PLS

### Hasil Pengujian Kualitas Data

#### 1. Uji *Outer Model*

##### 1) Validitas Konvergen

Digunakan untuk menilai korelasi dari pengukur-pengukur suatu konstruk. Pengukur-pengukur dalam suatu konstruk harusnya berkorelasi tinggi, oleh karena itu, nilai *loading factor* harus lebih besar dari 0.7. Berdasarkan hasil uji, semua nilai *outer loading* dari pengukur-pengukur yang ada telah lebih dari 0.7.

##### 2) Konstruk Reliabilitas dan Validitas

Nilai Average Variance Extracted (AVE) mengukur apakah variabel laten mampu menjelaskan rata-rata lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya. Berdasarkan hasil uji algoritma PLS, maka diketahui nilai AVE sudah lebih dari 0.5, sehingga sudah memenuhi kategori pengujian AVE. Selanjutnya nilai *composite reliability* harus lebih dari 0.70 agar membuktikan tingkat akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Dalam penelitian ini, nilai *composite reliability* adalah 1.00 sehingga sudah memenuhi syarat. Kemudian, nilai *cross loading* dari validitas diskriminan juga sudah di atas 0,70, yaitu 1.00 sehingga menjelaskan bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda tidak berkorelasi tinggi.

#### 2. Uji *Inner Model*

##### 1) Uji R-Square

Uji R-Square untuk mengukur seberapa besar variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan hasil uji R-Square yang dapat dilihat pada Gambar 1, nilai dari R-Square kecurangan laporan keuangan sebesar 0,081. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik dan media sosial terhadap kecurangan laporan keuangan adalah sebesar 8.1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

##### 2) Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan kalkulasi uji *bootstrapping* pada aplikasi smartPLS versi 3.2.9. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi *P-value*. Hasil koefisien parameter menunjukkan arah positif atau negatif dari pengaruh variabel independen terhadap dependen. Sedangkan, signifikansi pengaruh variabel independen terhadap dependen dilihat dari nilai *P-value*, jika nilai *P-value*  $\geq 0.05$ , maka tidak

berpengaruh. Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka semua hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung karena semua nilai *P-value* lebih besar dari 0.05. Lebih jelasnya, hasil pengujian hipotesis berdasarkan uji *bootstrapping* dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien Parameter	P-Values	Hasil
H1	-0.210	0.303	Tidak Terdukung
H2	-0.154	0.168	Tidak Terdukung
H3	0.269	0.190	Tidak Terdukung

Sumber: Data Diolah smartPLS, 2023.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan uji hipotesis yang pertama, dapat diketahui bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap variabel indikasi kecurangan laporan keuangan. Tidak signifikannya pengaruh koneksi politik terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan dalam penelitian ini bisa terjadi karena berdasarkan nilai rata-rata Benish M-Score dalam analisis statistik deskriptif yang mengukur apakah perusahaan termasuk sebagai manipulator laporan keuangan atau tidak, menunjukkan nilai -2.5762 atau lebih kecil dari -2.22. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih mengarah pada perseptif teori legitimasi. *Top management* yang terkoneksi politik akan berusaha untuk menjaga legitimasi masyarakat karena mereka sendiri memiliki kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan perusahaan, mereka akan berusaha untuk mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan terkait laporan keuangan, serta tidak melakukan kecurangan karena adanya pengawasan dari masyarakat. Apabila para pimpinan yang terkoneksi politik melakukan kecurangan hingga terungkap di publik, maka hal itu bisa mengancam karir politiknya sendiri. Dengan demikian, para pimpinan yang terkait politik akan terus menjaga citra perusahaan tetap baik, karena secara tidak langsung juga akan merepresentasikan citra diri mereka.

Selanjutnya, hasil penelitian ini sejalan dengan teori pensinyalan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahsan dan Abdul (2018), yaitu dengan adanya koneksi politik dalam perusahaan akan memberikan sinyal yang positif bagi para pemangku kepentingan berupa kredibilitas yang tinggi atas laporan keuangan sehingga bisa mengurangi asimetri informasi yang diterima. Selain itu, jika dilihat dari arah koefisien parameter, maka pengaruh koneksi politik terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan berarah negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa, jika koneksi politik tinggi, maka indikasi kecurangan laporan keuangan akan rendah. Menurut hasil analisis statistik deskriptif, rata-rata perusahaan pertambangan memiliki proporsi koneksi politik yang cukup besar, sehingga sesuai jika indikasi kecurangan laporan keuangannya kecil. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian ini tidak termasuk ke dalam perusahaan yang melakukan kecurangan atas laporan keuangan.

### Pengaruh Media Sosial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ke dua, ternyata variabel media sosial tidak berpengaruh terhadap variabel indikasi kecurangan laporan keuangan. Tidak mempunya media sosial mengungkapkan indikasi kecurangan laporan keuangan karena banyak juga masyarakat saat ini yang menganggap bahwa informasi yang diungkapkan tidak merefleksikan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Dyck, dkk., 2018).

Jika melihat arah pengaruhnya yang bersifat negatif, maka apabila pengungkapan informasi perusahaan di media sosial tinggi, maka indikasi kecurangan keuangan akan rendah. Melihat hasil analisis statistik deskriptif, maka arah pengaruhnya sudah sesuai, karena nilai rata-rata pengungkapan

media sosialnya tinggi yaitu mencapai 78.66% dan nilai indikasi kecurangan laporan keuangan yang lebih kecil dari -2.22 atau tidak ada indikasi kecurangan laporan keuangan.

#### Pengaruh Media Sosial sebagai Variabel Moderasi terhadap Hubungan antara Koneksi Politik dan Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa media sosial tidak memoderasi hubungan pengaruh koneksi politik terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Hal ini juga terjadi karena secara independen pun, baik variabel media sosial maupun koneksi politik dalam penelitian ini tidak mempengaruhi variabel indikasi kecurangan laporan keuangan. Media sosial tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara koneksi politik dan kecurangan laporan keuangan karena menurut Dyck, dkk. (2018), informasi yang diungkapkan dalam media sosial serta berita yang dirilis hanyalah memuaskan keinginan dari para pembaca saja, tidak mengungkapkan kondisi yang sebenarnya.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian, maka koneksi politik tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian termasuk perusahaan yang tidak terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan berupaya untuk menjaga legitimasi masyarakat dan memberi sinyal yang positif kepada para pemangku kepentingan agar juga bisa mempertahankan citra yang baik di masyarakat sebagai politisi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel media sosial baik secara independen maupun berasosiasi dengan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini didorong oleh anggapan masyarakat bahwa informasi yang diungkapkan perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, hanyalah memuaskan keinginan pembaca saja.

## REFERENSI

- Ahsan, h., & Abdul, H. M. (2018). Political connections and audit report lag: Indonesian evidence. *International Journal of Accounting & Information Management*, <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2016-0086>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2016). Report to The Nations on Occupational Fraud and Abuse, Global Fraud Study. Retrieved from: <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/2016-report-to-the-nations.ashx>
- Astutik, D., Harymawan, I., Nasih, M. (2018). The effectiveness of social media and press release transparency to detect indications of financial fraud. *Journal of Applied Economic Sciences*, Volume XIII, Fall 6(60), 1507-1518.
- Black, L., and Quach, A. (2009). *Long-term business success through corporate responsibility*. White Paper by Australian Centre for Corporate Social Responsibility (ACCSR) and SAI Global.
- Beneish, M.D., Lee, C.M.C. and Nichols, D.C. (2012). *Fraud Detection and Expected Returns*. SSRN Working Paper, 1-52. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.1998387>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282-311. DOI: <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Dyck, A., Volchkova, N. and Zingales, L. (2008). The Corporate Governance Role of the Media: Evidence from Russia. *The Journal of Finance*, LXIII (3), 1093-1135. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01353.x>
- Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management*, 14(1), 57-74.
- Faccio, Mara. (2010). Differences between Politically Connected and Non connected Firms: A Cross

- Country Analysis. *Financial Management*, 24. Autumn, 905-927.
- Garay, U., González, M., Guzmán, A., and Trujillo, M.A. (2013). Internet-based corporate disclosure and market value: Evidence from Latin America. *Emerging Markets Review*, 17(1), 150-168. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2013.09.002>
- Gajewski, J., Li, L. (2015). Can Internet-based disclosure reduce information asymmetry? *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 31: 115-124. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.adiaac.2015.03.013>
- Habib, A., & Muhammadiyah, A. H. (2018). Political Connections and Audit Report Lag: Indonesian Evidence. *International Journal of Accounting & Information Management*, 1-35.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360
- Karakiza, M. (2015). The impact of Social Media in the Public Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 175: 384-392, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1214>
- Leuz, C., & Gee, F. O. (2006). Political Relationship, Global Financing and Corporate Transparency: Evidency from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 411-439.
- Mäkinen, M., Kuira, M.W. (2008). Social Media and Postelection Crisis in Kenya. *The Journal of Press and Politic*, 13(3), 328-335. DOI: <https://doi.org/10.1177/1940161208319409>
- Universitas Airlangga. (2022). Kecenderungan Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak: Berpengaruh terhadap Keterbacaan Laporan Keuangan yang Rendah. Retrieved from: <https://news.unair.ac.id/2022/01/28/kecenderungan-perusahaan-melakukan-penghindaran-pajak-berpengaruh-terhadap-keterbacaan-laporan-keuangan-yang-rendah-2/?lang=id>
- Miller, G.S. (2006). The Press as a Watchdog for Accounting Fraud. *Journal of Accounting Research*, 44(5), 1001-1033. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2006.00224.x>
- Mining Advocacy Network. (2018). Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara. Retrieved from: <https://www.jatam.org/coalruption-elit-politik-dalam-pusaran-bisnis-batu-bara/>
- Muttakin, M. B., Monem, R. M., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Family firms, firm performance and political connections: Evidence from Bangladesh. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11 (3), 215-230. SEP
- Sabrina et al. (2020). Pengaruh Koneksitas Organ Corporate Governance, Ineffective Monitoring dan Manajemen Laba terhadap Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, 109-122.
- S. Preuss and R. Königsgruber. (2020). How do corporate political connections influence financial reporting? A synthesis of the literature, *J. Account. Public Policy*, <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106802>
- Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Suchman, M.C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610.
- Sumual, F. and Karundeng, F. (2022). Political and Military Connection, Audit Delay, and Tax Avoidance: An Avidence in Indonesia. *SHS Web Conferences* 149. DOI: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214903024>
- Taj, S.A. (2016). Application of signaling theory in management research: Addressing major gaps in theory. *European Management Journal*, 34(4), 338-348. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.02.001>
- Utaminingsi, L. (2019). Political Connection, Auditor Selection, Audit Fee & Audit Report Lag: A review in Indonesia. *International Journals of Sciences and High Technologies*, 167-173
- Wells, J. T. (2005). *Principles of Fraud Examination*. Hoboken: John Willey & Sons, Inc
- Wu, Wenfeng., Wu, Chongfeng., Zhou, Chunyang., & Wu, Jun. (2012). Political Connections, Tax Benefit and Firm Performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31, 277-300.